



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

LAPORAN

**KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
MELALUI (*FOCUSED GROUP DISCUSSION/ FGD*)
URGENSINYA PEMBENTUKAN
MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP)
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2023**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Jalan Sutan Syahrir Nomor 2-B Telepon (0532) 28064/Fax. (0532) 23057

PANGKALAN BUN – KALIMANTAN TENGAH

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga dapat terlaksana kegiatan Forum Konsultasi Publik berupa Diskusi Grup Terfokus (*Focused Group Discussion*) Urgensinya Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kotawaringin Barat yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik berupa Diskusi Grup Terfokus (*Focused Group Discussion*) Urgensinya Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Pelayanan Publik atas nama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/49/PP.05/2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal Tindak Lanjut Surat Usulan Pembentukan MPP Tahun 2022 atas persetujuan Surat Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 500/233/DPMPSTP.B. tanggal 21 Pebruari 2022. Perihal Permohonan Persetujuan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan. dalam rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya koordinasi antara pemerintah (penyelenggara pelayanan) dengan masyarakat sebagai pengguna layanan

Kami mengucapkan terimakasih kepada stakeholders dan para pihak terkait lainnya yang berperan aktif, sehingga tersusunnya Laporan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik.

Semoga segala upaya kita dalam mengemban tugas-tugas pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan Rahmat dan Ridho Allah SWT.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pangkalan Bun, 21 Maret 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**



**Ir. H. KAMALUDIN, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650105 199403 1 010**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

KATA PENGANTAR..... i-ii

DAFTAR ISI iii

A. PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang 1

2. Tujuan dan Manfaat 2

3. Ruang Lingkup..... 3

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP 3

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 3

2. Penyelenggara dan Peserta FKP 3

3. Metode Pelaksanaan FKP 5

4. Susunan Acara FKP 6

C. HASIL PELAKSANAAN FKP 7

1. Identifikasi Masalah..... 7

2. Analisis..... 7

3. Rencana Aksi 9

D. PENUTUP..... 10

LAMPIRAN I Berita Acara Yang Ditandatangani

LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir

LAMPIRAN III Surat Undangan

LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan

LAMPIRAN V Materi FKP

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga kabupaten Kotawaringin Barat tentang peningkatan pelayanan publik perizinan. Pelayanan publik berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik didefinisikan sebagai berikut: "Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik" Lebih lanjut lagi, salah satu hal yang dibahas dalam UU 25/2009 adalah perihal peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. Peran serta masyarakat tersebut diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik. Kemudian, mengenai pelaksanaannya secara khusus diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel Lebih rinci lagi, pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi:

- a) penyusunan kebijakan pelayanan publik;
- b) penyusunan standar pelayanan;
- c) pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- d) pemberian penghargaan.

Pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilakukan secara perorangan, perwakilan kelompok pengguna pelayanan, perwakilan kelompok pemerhati maupun perwakilan badan hukum yang mempunyai kepedulian terhadap pelayanan publik.

Pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana disampaikan dalam bentuk masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan kepada Penyelenggara dan atasan langsung penyelenggara pelayanan publik serta pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau melalui media massa. Penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tindak lanjut penyelesaian masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2023 ini telah melakukan kegiatan Forum Konsultasi Publik berupa Diskusi Grup Terfokus (*Focused Group Discussion*) Urgensinya Pembentukan dan Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kotawaringin Barat pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai tindak lanjut dari Surat Deputy Bidang Pelayanan Publik atas nama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/49/PP.05/2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal Tindak Lanjut Surat Usulan Pembentukan MPP Tahun 2022 atas persetujuan Surat Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 500/233/DPMPTSP.B. tanggal 21 Pebruari 2022. Perihal Permohonan Persetujuan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kotawaringin Barat yang memerintahkan untuk dilengkapi dokumen Forum Konsultasi Publik.

2. Tujuan dan Manfaat Pelaksanaan FKP

Tujuan pelaksanaan FKP adalah agar terpenuhinya dokumen Kajian Urgensinya Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kotawaringin Barat.

Penyelenggara Pelayanan dan Masyarakat memperoleh pemahaman yang sama dan solusi atas permasalahan yang ada, antara lain terkait pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan, sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Kemudian, agar masyarakat diberi kesempatan untuk mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

3. Ruang Lingkup

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) penyusunan kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik difokuskan pada pelaksanaan Diskusi Grup Terfokus (*Focused Group Discussion*) Urgensinya Pembentukan dan Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kotawaringin Barat pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP.

1. Waktu dan tempat pelaksanaan.

Forum Konsultasi Publik (FKP) penyusunan kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik difokuskan pada pelaksanaan Diskusi Grup Terfokus (*Focused Group Discussion*) Urgensinya Pembentukan dan Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kotawaringin Barat pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 Ini, dilaksanakan pada Hari Senin Tanggal 20 Maret 2023, Bertempat di Hall/Ball Room Hotel Brits Pangkalan Bun Jalan A. Yani KM. 2 Pangkalan Bun.

2. Penyelenggara dan Peserta.

a. Penyelenggara.

Penyelenggara Forum Konsultasi Publik (FKP) penyusunan kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik difokuskan pada pelaksanaan Diskusi Grup Terfokus (*Focused Group Discussion*) Urgensinya Pebentukan dan Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kotawaringin Barat pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 800/37/DPMPTSP.B/2022 tanggal 3 November 2022 tentang Penetapan Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.

b. Peserta.

Peserta Forum Konsultasi Publik (FKP) penyusunan kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik difokuskan pada pelaksanaan Diskusi Grup Terfokus (*Focused Group Discussion*) Urgensinya Pebentukan dan Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kotawaringin Barat pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat yang diundang berjumlah 50 (lima puluh) peserta terdiri dari :

- 1) Unsur Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama di wakili oleh Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab. Kotawaringin Barat dan Wakil Ketua MUI Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 2) Unsur Akademisi diwakili oleh Wakil Rektor Universitas Anta Kusuma (UNTAMA) Pangkalan Bun.
- 3) Unsur Pelaku Usaha diwakili oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kabupaten Kotawaringin Barat dan Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi (GAPENSI) Kabupaten Kotawaringin Barat serta Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Kotawaringin Barat.

- 4) Unsur Praktisi/ Ahli diwakili oleh Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kabupaten Kotawaringin Barat dan Ketua Majelis Kehormatan Notaris Indonesia (INI) Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 5) Unsur Profesi diwakili oleh Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Kotawaringin Barat dan Sekretaris Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Kotawaringin Barat serta Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 6) Unsur Media Massa diwakili oleh Harian Radar Sampit dan Pimpinan SBTV Pangkalan Bun
- 7) Unsur Organisasi Masyarakat Sipil diwakili oleh Ketua LSM Yayasanin Pangkalan Bun dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 8) Satuan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang melakukan pelayanan Publik.
- 9) Instansi Vertikal/ unit kerja, BUMN/BUMD yang berada dan beroperasi wilayah kerjanya di Kabupaten Kotawaringin Barat yang melakukan pelayanan Publik.
- 10) Ombusman Perwakilan Kalimantan Tengah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- 11) Unsur Pengawas Internal dari Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Bagian Organisasi Setda Kab. Kobar beserta Kasubag Pelayanan Publik dan Bagian Hukum Setda Kab. Kobar

3 Metode Pelaksanaan FKP

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) dilakukan dengan metode tatap muka dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik difokuskan pada pelaksanaan Diskusi Grup Terfokus (*Focused Group Discussion*) Urgensinya Pembentukan dan Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kotawaringin Barat pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.

4. Susunan Acara FKP

- a. Register Peserta Forum Konsultasi Publik.
- b. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
- c. Pembacaan Do'a oleh Pegawai dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Barat.
- d. Laporan Ketua Panitia Forum Konsultasi Publik (FKP) oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.
- e. Pembukaan Forum Konsultasi Publik (FKP) oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mewakili Penjabat Bupati Kotawaringin Barat
- f. Pemaparan Forum Konsultasi Publik dan Standar Pelayanan oleh Bapak Taufiq Hidayanto Setiawan, S.E., M.Pub.Admin(Pol) Analis Kebijakan Madya Asisten Deputi Standarisasi Pelayanan Publik Dan Pelayanan Inklusif Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- g. Diskusi Tanya jawab Pembahasan Urgensinya Pembentukan dan Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kotawaringin Barat dipandu Bapak Ir. H. Kamaludin, M.Si. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.
- e. Kesimpulan FKP melalui FGD Urgensinya Pembentukan dan Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kotawaringin Barat pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.

- i. Penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik melalui Diskusi Grup Terfokus (*Focused Group Discussion*) Urgensinya Pembentukan dan Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kotawaringin Barat pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.
- j. Penutupan.

C. HASIL PELAKSANAAN FKP.

1. Masalah

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat perlu memfasilitasi pelayanan publik kepada masyarakat dan pelaku usaha yang dilakukan Instansi/unit kerja/ BUMN/BUMD dalam satu tempat untuk memudahkan dan mempercepat layanan dalam satu layanan yang terintegrasi dalam data tunggal yang dapat dimanfaatkan bersama-sama.

2. Analisis

Perlunya kesepakatan bersama dalam mewujudkan kemudahan pelayanan publik melalui kebijakan pelayanan satu atas dan pelayanan satu pintu yang dilakukan oleh Instansi Pusat dan Daerah serta BUMN/BUMD, maka keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai jawaban dan solusi dalam memberikan kemudahan, transparansi dan pencegahan KKN dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Hasil Konfirmasi dengan Instansi/Unit Kerja yang bersedia melakukan pelayanan pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kotawaringin Barat

Daftar Instansi/ Unit Kerja antara lain :

1. PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB

1. Layanan Informasi :

- Konsultasi /Advis Hukum
- Informasi Pembuatan Surat Keterangan Melalui Aplikasi Era Terang
- Informasi Pendaftaran Perkara melalui E-Court
- Informasi Proses Persidangan melalui E-Court
- Permohonan Informasi Publik sebagaimana SK KMA No.2-144/SK/VIII/2022

2. Layanan Era terang :

- Pembuatan Akun pada Aplikasi Era Terang untuk Pembuatan Surat Keterangan
- Pengiputan data Pemohon pada Aplikasi Era Terang

3. Layanan E-Court :

- Pembuatan Akun E-Court Pengguna Lain
- Pendaftaran perkara melalui E-Court bagi Pengguna Lain

2. KEJAKSAAN NEGERI KOTAWARINGIN BARAT

1. Layanan E-Tilang
2. Layanan Cek Status Penanganan Perkara
3. Layanan Pengembalian Barang Bukti
4. Pelayanan Hukum Gratis
5. Laporan Pengaduan Masyarakat

3. KEPOLISIAN RESORT KOTAWARINGIN BARAT

1. Pelayanan Penerbitan SIM.
2. Pelayanan Penerbitan SKCK.
3. Sidik Jari/ Rekomendasi.
4. Pelayanan SPKT.

4. KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PANGKALAN BUN

1. Konsultasi Perpajakan
2. Pelaporan SPT Tahunan
3. Pembuatan Billing Pajak
4. Pendaftaran NPWP
5. Penghapusan NPWP
6. Perubahan data WP dan/atau PKP
7. Permohonan WP Non Efektif
8. Pengaktifan kembali WP Non Efektif
9. Aktifasi EFIN
10. Permohonan Pencabutan PKP
11. Permohonan pemindahbukuan
12. Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Penghasilan Has Atas Tanah dan/atau Bangunan

5. KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG (BPN) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

1. Pelayanan Pengukuran Bidang Tanah
2. Pelayanan Informasi Pertanahan Pengecekan Sertipikat SKPT
3. Layanan Penghapusan Hak Tanggungan (ROYA) Layanan Penghapusan Catatan BPHTB terhutang
4. Layanan Perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik luasan ≤ 600 m²
5. Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan PKKPR berusaha Luasan ≥ 1 Ha s/d 500 Ha
6. Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan PKKPR Non berusaha Luasan ≤ 1 Ha

6. KANTOR IMIGRASI SAMPIT / UNIT KERJA KANTOR PANGKALAN BUN

1. Paspor Baru
2. Paspor Penggantian Habis Berlaku

7. KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI

1. Informasi Kegiatan Kepabeanan dan Cukai.
2. Informasi Registrasi IMEI.
3. Informasi Impor Sementara Kapal Wisata Asing.
4. Klinik Export.

8. KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

1. Layanan Informasi dan Konsultasi Haji dan Umroh.
2. Layanan Pengukuran Arah Kiblat Masjid/Mushola.
3. Layanan Surat Keterangan Terdaftar Rumah Ibadah.
4. Layanan Surat Keterangan Terdaftar Lembaga Keagamaan (Organisasi Agama/Majelis Taklim).
5. Layanan Surat Rekomendasi Rumah Ibadah.
6. Layanan Surat Rekomendasi Lembaga Keagamaan (Organisasi Keagamaan/Majelis Taklim).
7. Layanan Petugas Do'a.
8. Layanan Petugas Rohaniwan.

9. BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah)

1. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
2. Pembayaran Pajak Air Permukaan
3. Pembayaran Pajak Alat Berat

10. BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)

1. E-Sertifikasi :
 - Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB)
 - Cara Produksi Kosmetik Yang Baik (CPKB)
 - Persetujuan Denah Industri Kosmetik
 - Cara Produksi Obat Tradisional Yang Baik (CPOTB)
2. E-registrasi untuk memperoleh NIE :
 - Pangan Olahan
 - Kosmetik
 - Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

11. BPJS KESEHATAN (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

1. Pendaftaran Kepesertaan JKN-KIS
2. Informasi Tentang Program Jaminan kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)

12. BPJS KETENAGAKERJAAN (BPJS JAMSOSTEK)

1. Informasi Pendaftaran dan Persyaratan Klaim
2. Akuisisi Kepesertaan Penerima Upah
3. Akuisisi Kepesertaan Bukan Penerima Upah
4. Akuisisi Kepesertaan Jasa Kontruksi
5. Asistensi Jamsostek Mobile (JMO) dan Lapak Asim Online
6. Layanan lainnya sesuai dengan standar BPJS Ketenagakerjaan

13. BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

1. Pelayanan Pendataan dan Pendaftaran 11 (sebelas) Pajak Daerah
2. Pelayanan Penetapan 11 (sebelas) Pajak Daerah
3. Pelayanan Pembayaran 11 (sebelas) Pajak Daerah

14. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. Layanan Pendaftaran Penduduk.
 - Kartu Keluarga
 - Pencetakan KTP EL
 - Perekaman KTP EL
 - Pencetakan KIA
 - Surat Pindah Datang
 - Identitas Kependudukan (IKD)
2. Layanan Pencatatan Sipil
 - Akte Kelahiran
 - Akte Perkawinan
 - Akte Perceraian
 - Akte Kematian

15. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

1. Pelayanan Penerbitan Kartu Pencari Kerja (AK 1)
2. Pelayanan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)
3. Pelayanan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama(PKB)
4. Pelayanan Pencatatan LKS Bipartit/SP/SB/PKWT
5. Pelayanan Pengaduan (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial)
6. Pelayanan Konsultasi Tentang Peraturan Ketenagakerjaan
7. Pelayanan Konsultasi Tentang Peraturan Ketenagakerjaan

16. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. Pelayanan Sewa Alat Berat (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah)
2. Pelayanan Sewa Alat Uji Laboratorium Bahan Konstruksi.
3. Pelayanan Mobil Toilet.

17. DINAS KESEHATAN

Terdapat 37 (tiga puluh tujuh) layanan perizinan.

18. DINAS PERTANIAN

Terdapat 6 (enam) layanan Nonperizinan.

19. PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ARUT

1. Pelayanan Pembayaran Rekening Air dan Non Air.
2. Pendaftaran Sambungan Rumah {SR} Baru.
3. Pelayanan Keluhan Pelanggan.

20. KANTOR POS INDONESIA CABANG PANGKALAN BUN

1. Layanan pengiriman surat dan paket pos.
2. Layanan jasa keuangan.

21. Sebanyak 8 (Delapan) Instansi/Unit Kerja Dalam Tahap Verifikasi Antara Lain Pengadilan Agama Pangkalan Bun, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Kobar, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Dan Beberapa Perbankan (BANK KALTENG, BSI, BRI, BNI, BANK MANDIRI, BANK BTN DAN BPR MARUNTING SEJAHTERA)

D. PENUTUP.

Dari hasil penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) penyusunan kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik difokuskan pada pelaksanaan Diskusi Grup Terfokus (*Focused Group Discussion*) Urgensinya Pembentukan dan Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kotawaringin Barat pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat bersama Tim Pembentukan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kotawaringin Barat berusaha mewujudkan pembangunan dan pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai wadah bersama melaksanakan pelayanan yang terintegrasi untuk memberi kemudahan dan transparansi serta pencegahan KKN

Demikianlah, Forum Konsultasi Publik (FKP) penyusunan kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik difokuskan pada pelaksanaan Diskusi Grup Terfokus (*Focused Group Discussion*) Urgensinya Pembentukan dan Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kotawaringin Barat pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat ini disusun sebagai satu kesatuan dokumen kajian urgensinya pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kotawaringin Barat, dan semoga memberikan informasi kepada Instansis, Unit Kerja dan stakeholders pelayanan publik. Sekian Terimakasih.

Pangkalan Bun, 21 Maret 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**



**Ir. H. KAMALUDIN, M.SI.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650105 199403 1 010**



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sutan Syahrir No. 2B Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74112

Telpon (0532) 28064 / Fax (0532) 23057

Website : dpmptsp.kotawaringinbaratkab.go.id Email : dpmptspkobar@gmail.com

BERITA ACARA
FORUM KONSULTASI PUBLIK MELALUI DISKUSI GRUP TERFOKUS
(FOCUSED GROUP DISCUSSION) URGENSINYA PEMBENTUKAN MAL PELAYANAN
PUBLIK (MPP) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 800/ 18 /DPMPTSP.B.

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Ballroom/Hallroom Hotel Brits Jalan A.Yani KM.2 Pangkalan Bun, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Melalui Diskusi Grup Terfokus (*Focused Group Discussion*) Urgensinya Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kotawaringin Barat

Pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) melalui Diskusi Grup Terfokus (*Focused Group Discussion*) Urgensinya Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kotawaringin Barat dipandu/difasilitasi langsung oleh Narasumber Bapak TAUFIQ HIDAYANTO SETIAWAN, S.E., M.Pub.Admin(Pol) Analis Kebijakan Madya Asisten Deputi Standarisasi Pelayanan Publik Dan Pelayanan Inklusif Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil diskusi bersama dan dapat diambil keputusan bersama untuk mendukung Pembangunan dan Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kotawaringin Barat melalui kesepakatan bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Instansi/Unit Kerja berkomitmen dan bersedia melakukan Layanan pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tindak lanjut Komitmen dan dukungan akan diwujudkan dalam bentuk Nota Kesepahaman/ *Memorandum of Understanding (MoU)* dan Perjanjian Kerja Sama antar pihak terkait.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir, akan melakukan pemantauan dan mengawasi progres pembangunan dan pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kotawaringin Barat serta jalannya Layanan pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Pangkalan Bun, 20 Maret 2023.

A. INSTANSI/ UNIT KERJA LAYANAN

NO.	NAMA	No. HP	Jenis Kelamin	PERWAKILAN	TANDA TANGAN
1.	Noor Inayah, S.H.	089530644933	P	Pengadilan Agama Pangkalan Bun	1.
2.	Nurike. R, S.H.	085786502919	P	Kejaksanaan Negeri Kotawaringin Barat	2.
3.	Sudarsono, S.Sos	085246177678	L	Kepolisian Resort Kotawaringin Barat	3.
4.	M.Aldhietya Aswatra S.STP., M.IP	082255989994	L	DPMPTSP Prov. Kalimantan Tengah	4.
5.	H. Hadrian Nur, S.Ag.	081347079626	L	Kemenag Kotawaringin Barat	5.
6.	Mira Amiria Satuti	081349515291	P	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit	6.
7.	Rahayu Padmawati, S. Farm., Apt.	082148343599	P	Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat	7.
8.	Isti Wahyuni	085249097095	P	Kantor KPP Pratama Pangkalan Bun	8.
9.	M. Akhyar	085260766733	L	Kantor Bea Cukai Pangkalan Bun	9.
10.	Febri Effendi, S.SiT., M.M.	082220941322	L	Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (BPN) Kab. Kobar	10.
11.	Muhammad Ali Sofwan Nur, S.E.	081251195518.	L	Kepala UPTD Bapenda Prov. Kalteng dan Kakan Bersama Samsat P. Bun	11.
12.	Octa Nova	081617734044	P	BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalan Bun	12.
13.	Suwandi		L	PT. POS Indonesia Cabang Pangkalan Bun	13.
14.	Listen P. Sinaga	081349010827	L	PT. PLN (Persero) Cabang/ Ranting P. Bun	14.
15.	Sapriansyah, S.Sos	081336771503	L	Perumda Air Minum Tirta Arut Kab. Kobar	15.
16.	Ekat Hawini	081350154737	P	PT. Bank Kalteng Cab. Pangkalan Bun	16.
17.	Ida Jamilah	082255539580	P	PT. Bank BRI Cabang Pangkalan Bun	17.
18.	Tini	08254513651	P	PT. Bank BNI 46 Cabang Pangkalan Bun	18.
19.	Herpiansyah Putra D.	081361359906	L	PT. Bank Mandiri Cabang Pangkalan Bun	19.
20.	Didik Setiawan		L	BPR Marunting	20.

B. STAKEHOLDERS LAYANAN

NO.	NAMA	No. HP	Jenis Kelamin	PERWAKILAN	TANDA TANGAN
1.	Muhammad Rusmawardi, SH, MH	08125088068	L	Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat	1.
2.	Drs. H. Asroqi Purnomo	082253001539	L	MUI Kotawaringin Barat	2.
3.	Drs. H. Abdul Kadir	085249111727	L	FKUB Kotawaringin Barat	3.
4.	Achmad Chairdiansyah, S.H. M.Kn	082350093018	L	KADIN Kab. Kotawaringin Barat	4.
5.	M. Gusti Hadiansyah, S.T., M.T	082232407050	L	BPC GAPENSI Kotawaringin Barat	5.
6.	A. Fredy		L	HIPMI Kotawaringin Barat	6.
7.	Nurhadi, S.H. M.Kn	08125167350	L	Ikatan Notaris Indonesia Kotawaringin Barat	7.
8.	dr. Zainudin Aziz, Sp.P	081231592216	L	Ikatan Dokter Indonesia Kotawaringin Barat	8.
9.	Aimandinata, S.Kep.,Ners	081349045406	L	DPD PPNI Kotawaringin Barat	9.
10.	Elly Agustina, A.Md. Keb	081349179201	P	Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cab. Kobar	10.
11.	Ganesha Septa	082221315698	P	Ketua ORGANDA Kabupaten Kotawaringin Barat.	11.
12.	Thomas Sari Wuwur	081349021411	L	ASITA KOBAR	12.
13.	Syamsudin	085250008435	L	Radar Sampit Biro Pangkalan Bun	13.
14.	Ennog	081349201974	P	LSM Yayorin	14.



Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Dr. Ir. JUNI GULTOM, S.T., MTP.
Pembina Utama Madya
NIP. 19680609 199503 1 003

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Ir. H. KAMALUDIN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650105 199403 1 010

Menyaksikan,

Analisis Kebijakan Madya Asisten Deputi Standarisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusif Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpanrbri,

TAUFIQ HIDAYANTO SETIAWAN, S.E., M.Pub.Admin(Pol)
Pembina

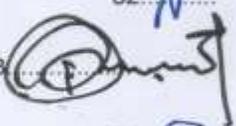
NIP. 19821110 200604 1 001

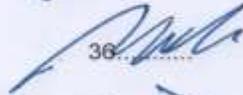
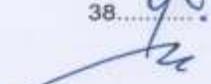
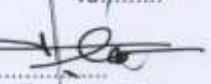
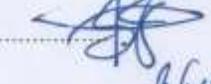
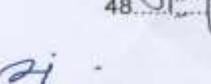
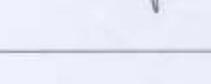
LAMPIRAN II

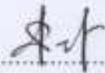
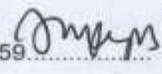
DAFTAR HADIR KEGIATAN

Hari : **SENIN**
 Tanggal : **20 MARET 2023**
 Pukul : **07.30 WIB sampai dengan selesai**
 Tempat : **Hall Hotel Brits Pangkalan Bun.**
Jl. A Yani KM.2 Kel. Baru Pangkalan Bun.
 Acara : **Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) melalui Diskusi Grup Terfokus (Focused Group Discussion) Urgensinya Pembentukan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kotawaringin Barat.**

NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI/ UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1.	M. Adhikarta	Kec. Umum	DPMD KALTENG	1.
2.	M. Akhyar	Kasi KP	Bea Cukai P. Bun	2.
3.	ERMAN S.	SFO.	PT. PLN.	3.
4.	Elly Agustina.	Stk organisasi	IPRI Cabang Koban	4.
5.	Lyster P. Sanga	SFO	PT. PLN	5.
6.	Ida Jamilah	CBM	BRI P. Bun	6.
7.	Ekat Hawini	Pimbid Pelayanan	Bank Kalteng P. Bun	7.
8.	Herjansyah P. D.	BDM	Mandiri	8.
9.	A. Chandranegara	Walikota	KADIN	9.
10.	Ratayu Padmarati	PFM Ahli Muda	Loka POM Koban	10.
11.	MIK ELY WINA	Kabid P. Asas	Disperindagkop	11.
12.	JANAP	seka	BVS pusa	12.
13.	Octa Nova	KBL	BPS Fekozalanga	13.
14.	Dr. H. Asvogi	ket.	MUI	14.
15.	Debby Selvyanti	Prakom Muda	DPMP TSP Prov Kalteng	15.
16.	Sciwan di	EMUSIN Koban	PT. INS Iudonagar	16.

NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI/ UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
17.	TINI	Pemimpin Bidang	BANI KC	17. 
18.	GANESHA SEPRA	Pemasaran Bisnis WAKIL KERONTARA	Pangkalan Bur DPC OKARDA KOBAR	18. 
19.	AMIR YUSUF	Wakil. WRC.	KANTIN	19. 
20.	Fajri Siddiq	Kabid. Keu	BPS Kctungabekjara	20. 
21.	Aris Daudius	Acelis Jabatan	DEHETSP Kaltungo	21. 
22.	WINDA	SECRETARIS	DISVALKER	22. 
23.	ABDUL GAFUR	Kabid CK	PUPR	23. 
24.	A. Hafidhan Nur	Kasi Pouban	Kencana	24. 
25.	M. Ali Sufwan Nur	Ka. UPR	SAMSAT	25. 
26.	ACHMAD FURSTAMAN	PA. Tawaraha	SAMSAT	26. 
27.	M. Rudyanggah	IC. BOR	Diskonegri	27. 
28.	AMIR HADI	KADIC	DISHUB	28. 
29.	EDDY K	Kabag org	Set da	29. 
30.	SAPRIANSTAH	DIR PDAM	PDAM.	30. 
31.	FEBRI. Z	Kakanta	ATR / BPT	31. 
32.	ARHET DARY	ketua IKP	Diskemgo	32. 
33.	A. FREDDY	ketua	BPC HIPMI KOBAR	33. 
34.	SAID MUKSIN	JF PR	DPUPR	34. 

NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI/ UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
35.	Dedik Setiawan	Dirut	Bank Maroufing	35. 
36.	Ade Kamaludin	Limud IKR	TNI AU	36. 
37.	H. ABUL KADIR F. KH	KABID	KAI-FKUB	37. 
38.	Eki HIDAYATI	Setoran	Bapenda	38. 
39.	Desuaini	Letak IBI	RSSI	39. 
40.	Isti Wahyuni	Kasi Pelayanan	KPP Pratama	40. 
41.	Muhammad Set	INI	Payak (At)	41. 
42.	Aurri in Hasiang	Uka ketua	Bayanri	42. 
43.	TAMU JONGGI	nikonsi-ekspal	SA	43. 
44.	HENDRY P	KABID PELAYARAN	DISHUB	44. 
45.	Syamsudin	KABID Sampi P. Sum kabid	KABID Sampi	45. 
46.	Mira Amira S.	JFT	UKK Imigrasi Koban	46. 
47.	Herdik H	JFT	UKK Imigrasi	47. 
48.	PRIHATI	Pelaksana	DPMP TSP	48. 
49.	SUPTRI Handayani	kabid PPKM	DPMP TSP	49. 
50.	PRUMANTI	JF. PKPM	DPMP TSP	50. 

NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI/ UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
51.	Eni Istari	Asasus labyah	Setda.	51. 
52.	SUCUMBARAKIP	AKPP	DPMPPTSP	52. 
53.	Nopriandah	PELANTARA	DPMPPTSP	53. 
54.	FITRIANI YULIANI	KABID PTSP	DPMPPTSP	54. 
55.	Sri Banjarmasin	Jabung	PPMPTSP	55. 
56.	Ausita Wak	Kabid praksi	DPMPPTSP	56. 
57.	Risa Lihialatia	JFT PRATI tudek	'	57. 
58.	Daddy Sentiauwon	TKD	"	58. 
59.	Ely Restu S	Kabid Daerah	DPMPPTSP	59. 
60.	Nunung Narningsih	STAF	DPMPPTSP	60. 
61.	Ryan Taufiq H.	Honoran	-/-	61. 
62.	Caipran	JFKPax	DPMPPTSP	62. 
63.				63.
64.				64.
65.				65.

Pangkalan Bun, 20 Maret 2023.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Ir. H. KAMALUDIN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650105 199403 1 010



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Pangkalan Bun, 13 Maret 2023.

K e p a d a

Nomor : 500//56/DPMPTSP.B.
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Undangan Kegiatan FKP.

Yth. Daftar terlampir

di-

TEMPAT

Sehubungan dengan Pembentukan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kotawaringin Barat dan menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/49/PP.05/2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal Tindak Lanjut Surat Usulan Pembentukan MPP Tahun 2022, maka bersama ini diharapkan kehadirannya pada :

H a r i : SENIN

Tanggal : 20 Maret 2023

Pukul : 07.30 WIB sampai dengan selesai.

Tempat : Hall Room Brits Hotel Pangkalan Bun.

Jl. A. Yani KM.2 Pangkalan Bun.

Acara : Forum Konsultasi Publik (FKP) melalui Diskusi Grup Terfokus (*Focused Group Discussion*) Urgensinya Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kotawaringin Barat.

Konfirmasi kehadiran peserta harap dikirim melalui link <https://forms.gle/WXVjYGybjgrudr58> untuk informasi lebih lanjut dapat berkoordinasi/ berkomunikasi dengan saudari Supitri Handayanie, SAP, M.Si. (Hp.081251762614) atau saudara Gufron Winarno, S.H. (HP. 081349018376) atau via email : dpmptspkobar@gmail.com

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ANANG DIRJO, S.P., M.M.

LAMPIRAN SURAT

Nomor : 500/ 156 /DPMPTSP.B.

Tanggal : 13 Maret 2023.

Daftar Undangan Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) MPP

I. Daftar Undangan Pembukaan Acara FKP.

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.
3. Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun.
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat.
5. Kepala Kepolisian Resort Kotawaringin Barat.
6. Komandan KODIM 1014 PP Pangkalan Bun
7. Komandan Pangkalan TNI AU Iskandar Pangkalan Bun
8. Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
9. Inspektur Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

II. Daftar Undangan Peserta Kegiatan FKP.

A. Instansi/ Unit Kerja.

1. Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.
2. Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun.
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat.
4. Kepala Kepolisian Resort Kotawaringin Barat.
5. Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
8. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat.
9. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat
12. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
13. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat
14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat.
15. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat.
16. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.
17. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Barat.
18. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Kotawaringin Barat.
19. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Kotawaringin Barat.
20. Camat Arut Selatan.

21. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Barat.
22. Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Kotawaringin Barat.
23. Kepala Kantor KPP Pratama Pangkalan Bun.
24. Kepala Kantor UPTD Samsat Kotawaringin Barat.
25. Kepala Kantor Bea Cukai Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat.
26. Kepala Kantor Imigrasi Sampit.
27. Kepala Kantor Jasa Raharja Cabang Kotawaringin Barat.
28. Kepala BPOM Kabupaten Kotawaringin Barat.
29. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kotawaringin Barat.
30. Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Sampit.
31. Kepala PLN Cabang/Ranting Pangkalan Bun.
32. Kepala Kantor PT. Pos Indonesia Pangkalan Bun.
33. Direktur PDAM Tirta Arut Pangkalan Bun.
34. Pimpinan Cabang PT. Bank Kalteng
35. Pimpinan Cabang PT. Bank BNI 46
36. Pimpinan Cabang PT. Bank BRI
37. Pimpinan Cabang PT. Bank Mandiri
38. Pimpinan PD. BPR Marunting Sejahtera Kotawaringin Barat

B. Unsur Stakeholders Layanan.

1. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
2. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cabang Kab.Kotawaringin Barat
3. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab.Kotawaringin Barat.
4. Rektor Universitas Anta Kusuma (UNTAMA) Pangkalan Bun.
5. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kabupaten Kotawaringin Barat
6. Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Kabupaten Kotawaringin Barat
7. Ketua Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) Kabupaten Kotawaringin Barat
8. Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kabupaten Kotawaringin Barat
9. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Kotawaringin Barat.
10. *Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Kotawaringin Barat.*
11. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Kotawaringin Barat.
12. Ketua *Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Kotawaringin Barat.*
13. Ketua ORGANDA Kabupaten Kotawaringin Barat.
14. Ketua Association of The Indonesia Tours and Travel Agencies (ASITA) Kotawaringin Barat.
15. Pimpinan Surat Kabar Radar Sampit perwakilan Pangkalan Bun.
16. Pimpinan SBTV Pangkalan Bun.
17. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Pangkalan Bun.
18. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Kabupaten Kotawaringin Barat.

LAMPIRAN IV DOKUMENTASI

























LAMPIRAN V MATERI

panrb
KEMENTERIAN KOPERASI, UKM DAN KAWASAN PERSEKUTUAN
KOTAWARINGIN BARAT

Mal Pelayanan Publik sebagai Upaya Pengintegrasian Layanan secara Terpadu

Kotawaringin Barat, 20 Maret 2023

**#bangga
melayani
bangsa** **BerAKHLAK** **Taufiq Hidayanto Setiawan, SE., M.Pub.Admin(Pol)**
Analis Kebijakan Madya pada Deputi Bidang
Pelayanan Publik

panrb **BerAKHLAK** **#bangga
melayani
bangsa**

Arahan Presiden Joko Widodo Tentang **Reformasi Birokrasi**

- 1.**
Birokrasi yang
Berdampak
- 2.**
Reformasi Birokrasi
**Bukan Tumpukan
Kertas**
- 3.**
Birokrasi **Lincih
dan Cepat**

ARAHAN WAPRES TENTANG PENYELENGGARAAN MPP



"Mal Pelayanan Publik diselenggarakan dalam rangka untuk membantu memperbaiki kualitas pelayanan publik bagi masyarakat dan meningkatkan investasi di daerah. Oleh karena itu, MPP seyogianya segera terbangun di seluruh daerah di Indonesia. . . . Penyelenggaraan MPP yang ada saat ini masih terpusat di Pulau Jawa, sehingga daerah-daerah yang berada di luar Jawa perlu mempercepat pembangunan MPP. Pada tahun 2024 nanti, kita telah mencanangkan target 100% MPP sudah dibangun di seluruh Indonesia."

(Arahan Bapak Wakil Presiden pada Acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan MPP di Kantor Keresparnrb, 26 Juni 2022)

Apa itu MPP?

Peraturan Presiden No. 89 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan MPP

Mal Pelayanan Publik (MPP) adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan secara terpadu oleh penyelenggara pelayanan dalam 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.

Penyelenggara Pelayanan Publik disini terdiri dari:

- ❖ Kementerian,
- ❖ Lembaga,
- ❖ Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota,
- ❖ Badan usaha milik negara,
- ❖ Badan usaha milik daerah, serta
- ❖ Swasta.



Karakteristik MPP

1. One-Stop Services
2. Kolaboratif
3. Terintegrasi
4. Efisien
5. Transparan
6. Mudah diakses.
7. Nyaman

Tujuan

1. mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, keamanan pelayanan.

2. meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha.



Penyelenggara MPP

TUGAS PENYELENGGARA MPP*)
 (PENYELENGGARA MPP = DPMPSTSP sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam hal perizinan sehingga menjadi leading sector penyelenggaraan MPP)
 *) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah



Tahapan MPP





PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PADA MAL PELAYANAN PUBLIK Tanggal 28 Juni 2022



PIHAK KESATU
(Kemenpanrb)



PIHAK KEDUA
(Kemendagri)



PARA PIHAK PENYELENGGARA PELAYANAN

Menempatkan pelayanan publik pada MPP berupa pelayanan yang termasuk dalam jenis layanan utama, dengan menyediakan:

- ❖ Sarana pendukung dalam pelaksanaan pemberian pelayanan publik;
- ❖ SDM dalam pelaksanaan pemberian pelayanan publik; dan
- ❖ Anggaran/ pembiayaan pelaksanaan pemberian pelayanan publik, serta pertukaran data/informasi dalam penyelenggaraan pelayanan pada MPP.

- ❖ PARA PIHAK PENYELENGGARA PELAYANAN melaksanakan pemberian pelayanan publik pada MPP sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara MPP (DPMPTSP).
- ❖ Pelaksanaan lebih lanjut dari Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini akan disepakati dan dituangkan secara tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama.



Organisasi penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan dan badan hukum lainnya yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Dalam rangka mencapai tujuan dari penyelenggaraan MPP, maka organisasi penyelenggara **wajib** menempatkan pelayanan dalam MPP sesuai kebutuhan dan kondisi daerah.

Organisasi Penyelenggara yang sudah bergabung dalam MPP

K/L	BUMN/D
1. Mahkamah Agung	1. Bank Daerah (provinsi, kab/kota)
2. Kementerian Keuangan	2. Bank BRI, Mandiri, BTN
3. Kementerian ATR/BPN	3. Taspen
4. SPDM	4. PLN
5. Kemenaker	5. PDAM
6. Kementerian Agama	
7. Polri	
8. Kejaksaan RI	
9. Kementerian Kutham	
10. BP2MI	
11. SNN	
12. Perpusnas	
13. BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	



1



Pelayanan Langsung:
Pelayanan yang diberikan secara interaktif dengan tatap muka langsung. *contoh: pelayanan haji dan umrah oleh gerai Kantor Wilayah Agama*

3



Pelayanan Mandiri:
Pelayanan yang diberikan dapat diakses secara mandiri oleh pengguna layanan dengan menggunakan perangkat yang tersedia. *contoh: pelayanan ADM Adminduk oleh gerai Disdukcapil*

2



Pelayanan Secara elektronik:
Pelayanan yang diberikan secara interaktif dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi. *contoh: pelayanan OSS oleh gerai DPMPSTP*

4



Pelayanan Bergerak:
Pelayanan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat dengan menggunakan moda transportasi. *contoh: penyediaan mobil keliling pelayanan MPP*

Layout Open Space MPP



MPP Kota Bogor



MPP Kab Banyumas



MPP Kota Palembang



Mal Pelayanan Publik



SEMENTERI PANRB NO. 66 TAHUN 2020



1. KURSI RODA



2. PINTU MUDAH DIAKSES



3. JALAN LANDAI



4. LIFT KHUSUS



5. SELA SAR PENGHUBUNG



6. TOILET KHUSUS



7. LOKET KHUSUS



8. RUANG TUNGGU KHUSUS



9. GUIDING BLOCK



10. PARKIR KHUSUS



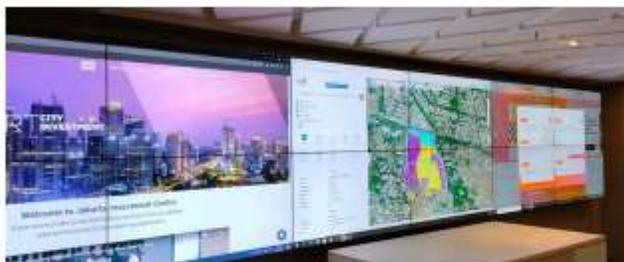
11. ALAT BANTU TUNANETRA/TUNARUNG U



12. AREA BERMAIN ANAK



13. RUANG LAKTASI



TRANSFORMASI DIGITAL

Mengubah cara kerja, beraktivitas, dan mekanisme bertransaksi dalam pelayanan publik.

Collaborative Governance

MAL PELAYANAN PUBLIK

Transformasi pelayanan publik dari yang sebelumnya konvensional menuju sistem yang modern. Mengedepankan model birokrasi yang tidak hanya e-government namun meningkat menjadi smart government.

Transformasi Digital Pelayanan Publik

- Amanah Perpres No 18 Tahun 2020 RPIMN 2020-2024 dan merupakan Program Prioritas Nasional
- Intensif dilaksanakan sejak **tahun 2020**
- Tim Kerja Bersama: Kementerian PANRB (Deputi Kelembagaan/SPBE dan Deputi Pelayanan Publik), Kementerian Kominfo, dan BSSN serta Peruri.
- Blueprint aplikasi** dan **blueprint infrastruktur** yang disusun Deputi YanLik PANRB diserahkan ke Dirjen Aptika Kemen Kominfo dalam upaya mempercepat terbentuknya Portal Pelayanan Publik.
- Amanah Perpres No 132 Tahun 2022
- Orkestrasi 4 kementerian** dalam layanan digital nasional pada lingkup **Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikannya**.
- Masih dalam **pembahasan mendalam** di masing-masing Kementerian dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Deputi YanLik



INSIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE NASIONAL BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN



Inventarisasi Layanan yang diberikan pada MPP (1)

Kemendagri	ATR/BPN	Kemenkumham
<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan KTP-el 2. Layanan Kartu Keluarga (KK) 3. Layanan Kartu Identitas Anak (KIA) 4. Layanan Akta Kelahiran 5. Layanan Akta Kematian 6. Layanan Akta Perkawinan 7. Layanan Akta Perceraian 8. Layanan Akta Pengakuan Anak 9. Layanan Akta Pengesahan Anak 10. Surat Ket. Pindah 11. Surat Ket. Pindah Dibang 12. Surat Ket. Pindah ke Luar Negeri 13. Surat Ket. Datang dari Luar Negeri 14. Surat Ket. Tempot Tinggal 15. Surat Ket. Kelahiran 16. Surat Ket. Lahir Mati 17. Surat Ket. Pembatalan Perkawinan 18. Surat Ket. Pembatalan Perceraian 19. Surat Ket. Kematian 20. Surat Ket. Pengangkatan Anak 21. Surat Ket. Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia 22. Surat Ket. Pengganti Tanda Identitas 23. Surat Ket. Pencatatan Sipil 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada empat layanan pertanahan yang dilayani secara elektronik, yakni Hak Tanggungan, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT) serta pengecekan sertifikat tanah. 2. Informasi Keterselesaian Tanah 3. Permisian Teknis Pertanahan 4. Pengukuran Bidang Tanah 5. Penetapan Hak Atas Tanah 6. Pendaftaran Keputusan Hak Atas Tanah <div style="background-color: #FFD700; text-align: center; padding: 2px;">Kejaksaan RI</div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi Hukum Gratis 2. Pelayanan e-Tilang <div style="background-color: #FFD700; text-align: center; padding: 2px;">BNN</div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan SK-PPN (Surat Keberangan Hasil Pemeriksaan Narkoba) <div style="background-color: #FFD700; text-align: center; padding: 2px;">LKPP (coming soon)</div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Pendaftaran E-Katalog 2. Pendaftaran Pelaku Usaha dalam SPSE (Sistem Pengaduan Secara Elektronik) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Informasi dan Konsultasi 2. Pelayanan Keimigrasian (Pembuatan paspor dan perpanjangan paspor) 3. Layanan AHU (Administrasi Hukum Umum) 4. Layanan pada Dirjen Kelayakan Intelektual 5. Layanan Advokasi Bisnis dan HAM/ Layanan Penilaian Mandiri Risiko Bisnis dan HAM <div style="background-color: #FFD700; text-align: center; padding: 2px;">Mahkamah Agung</div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan informasi dan konsultasi 2. Pelayanan Konsultasi Hukum 3. Pelayanan Peradilan (pendaftaran perkara, gugatan, jadwal persidangan, putusan, dan sebagainya) <div style="background-color: #FFD700; text-align: center; padding: 2px;">PT Taspen</div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan Kecelakaan Kerja 2. Tabung Hari Tua 3. Program Pensiun 4. Jaminan Kematian



JENIS LAYANAN MPP YANG BANYAK PEMOHON

NO	DISDUKCAPIL	NO	DPMPTSP
1	Layanan e-KTP	1	LAYANAN OSS (https://oss.go.id/informasi/umku)
2	Layanan Kartu Keluarga (KK)		
3	Layanan Akta Kelahiran	NO	IMIGRASI
4	Layanan Akta Kematian	1	Pelayanan Keimigrasian (Pembuatan paspor dan perpanjangan paspor)
5	Surat Keterangan Pindah		
No	SAMSAT	NO	POLRI
1	Perpanjangan STNK	1	Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan (SKTLK)
2	Pembayaran Pajak Kendaraan	2	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
		3	Surat Ijin Mengemudi (SIM)
NO	BPJS KESEHATAN		
1	Pendaftaran Faskes		
2	Fasilitas Kesehatan		



Pengembangan Fungsi MPP di Masa Depan

MPP menjadi ruang publik dan pusat aktivitas masyarakat

Mengoptimalkan Mal Pelayanan Publik bukan hanya untuk mendapatkan pelayanan publik, tapi juga untuk pusat kebutuhan aktivitas masyarakat sehari-hari, seperti: **tempat berbelanja, tempat belajar dan bermain, tempat berdiskusi, tempat berwisata, tempat berkreasi dan berusaha.**

The Future of MPP

MPP menjadi ruang publik dan pusat aktivitas masyarakat



Apa yang bisa didapatkan di MPP, selain pelayanan perizinan/non perizinan dari pemerintah?

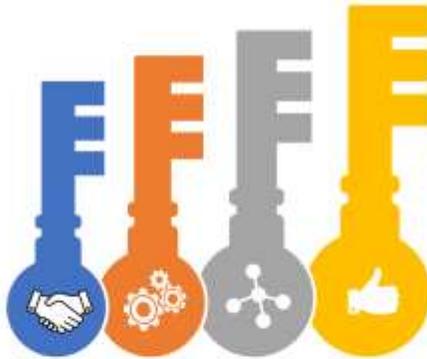
- Tiket *commuter*
- Tiket konser/festival
- Informasi pariwisata dan even-even lokal
- Layanan pengisian uang elektronik
- Layanan jasa pengiriman
- Layanan Pegadaian
- Periksa Kesehatan gratis
- Informasi penggunaan fasilitas olahraga
- *Co-working space*
- Dan lain-lain (d disesuaikan dengan kebutuhan lokal)

KOMITMEN

Komitmen setiap elemen yang terlibat, khususnya institusi/organisasi/unit yang terlibat di daerah yang memberikan pelayanan public sangat penting, terutama KEPALA DAERAH

KERJASAMA

Kerjasama yang baik dan kompak antar pemberi layanan di dalam MPP akan memberikan citra yang baik kepada Pemerintah.



INTEGRASI

Integrasi yang ada di dalam MPP diantaranya adalah : Integrasi antar OPD di lingkup Pemda Kab/kota, Pemda dengan instansi pusat, Pemda dengan BUMD, dll, dimulai dari sistem antrian hingga sharing data persyaratan yang diberikan oleh pengguna layanan.

KINERJA & KUALITAS

Kinerja disini menekankan pada kecepatan pelayanan, kesesuaian dengan Standar Pelayanan dan Maklumat, hingga profesionalisme dan hospitality dari petugas.